

Implementasi Desentralisasi Pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari

Dina Ratna Sari¹, & Ridwal Trisoni²

dinaratnasari091298@gmail.com¹

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia^{1,2}

Abstrak: Desentralisasi pendidikan membawa dampak positif maupun negatif bagi setiap sekolah yang menerapkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Responden penelitian ini berjumlah 5 orang yang meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru dan staf kependidikan. Instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara tentang implementasi desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara terstruktur dan mendalam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) bentuk desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sistem zonasi sekolah, dan pengintegrasian teknologi dalam kegiatan pendidikan, 2) dampak positif desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu peningkatan kualitas pendidikan, efisiensi administrasi pendidikan dan penyeteraan pendidikan, 3) dampak negatif desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu adanya kekuasaan baru yang belum kompeten, adanya celah untuk praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta menimbulkan tantangan lainnya.

Kata kunci: Desentralisasi Pendidikan, Dampak Positif, Dampak Negatif

Abstract: Education decentralization brings positive and negative impacts for every school that implements it. The purpose of this study was to determine the implementation of education decentralization in SMA Negeri 6 Batang Hari. The type of this research is descriptive qualitative research. Respondents in this study were 5 people, namely the principal, vice principals, teachers and education staff. The instrument of this research is an interview guide on the implementation of education decentralization in SMA Negeri 6 Batang Hari. The data collection technique in this research is through structured and depth interviews. The data analysis technique used in this study is the SWOT technique (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*). The results of this study indicate that: 1) the form of education decentralization in SMA Negeri 6 Batang Hari is School-based Management (SBM), school zoning systems, and the integration of technology in educational activities, 2) the positive impact of education decentralization in SMA Negeri 6 Batang Hari is an increasing quality of education, efficiency of education administration and education equalization, 3) the negative impact of education decentralization in SMA Negeri 6 Batang Hari, namely the presence of new incompetent powers, the existence of gaps for the practice of Corruption, Collusion and Nepotism, and poses other challenges.

Keywords: Education decentralization, Positive Impacts, Negative Impacts.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan upaya untuk memanusiakan manusia dimulai dari pengembangan aspek pengetahuan dan intelektual, pengembangan aspek keterampilan dan kompetensi kemampuan serta membentuk moral, sikap, karakter dan watak yang baik sebagai manusia yang bermatabat (Saleh, 2017; Sulaiman dkk.,

2018). Dengan demikian, pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa secara pengetahuan dan kemampuan serta membentuk watak manusia yang beradab dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa (Zaman, 2019; Sabil & Diantoro, 2021; Yalida, 2019). Oleh sebab itu, prinsip pendidikan yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berasaskan demokrasi, keadilan, otonomi, berdasarkan Hak Azasi Manusia (HAM) dan desentralisasi (Roza & S, 2018).

Sebagai salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, desentralisasi merupakan langkah pemerintah dalam memusatkan pengelolaan pendidikan di masing-masing daerah atau sekolah (Mok & Han, 2017; Sulaeman, 2022). Desentralisasi pendidikan merupakan upaya efektif dari pemerintah pusat untuk melimpahkan penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (You & Morris, 2016; Saleh, K. A., 2017; Sanur, 2020). Penyelenggaraan sistem desentralisasi pendidikan ini dikatakan efektif karena sistem pendidikan yang pada awalnya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau sistem sentralisasi berubah menjadi pelimpahan kekuasaan pada setiap daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri termasuk bidang pendidikan ini.

Menurut Zilfa (2016), desentralisasi pendidikan adalah kewenangan setiap daerah untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di daerahnya sendiri. Desentralisasi pendidikan tidak berhenti pada tingkat kota/kabupaten, akan tetapi pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai unit inti penyelenggara pendidikan. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan memungkinkan sekolah-sekolah mengatur pelaksanaan kegiatan pendidikan di instansi masing-masing sesuai dengan kebijakan daerah namun tidak melenceng dari kebijakan pendidikan nasional yang telah diatur pemerintah pusat.

SMA Negeri 6 Batang Hari merupakan salah satu sekolah yang menerapkan desentralisasi pendidikan. Sekolah Menengah Atas ini sudah terakreditasi A dengan memiliki segudang prestasi baik yang dihasilkan oleh peserta didik secara tim maupun individu maupun

oleh para tenaga pendidikan yang ada di sana. Walaupun demikian, pelaksanaan desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari perlu dianalisa karena masih terdapat kekurangan dalam penerapannya. Berdasarkan hasil wawancara pada studi pendahuluan penulis dengan kepala sekolah SMA Negeri 6 Batang Hari, dapat disimpulkan bahwa penerapan desentralisasi pendidikan ini membawa banyak dampak positif, namun tidak menepis masih terdapat dampak negatif yang dihasilkan dan harus dibenahi oleh SMA Negeri 6 Batang Hari. Maka dari itu, perlu adanya analisis terhadap penerapan desentralisasi penelitian ini agar dampak negatif yang terjadi dapat dirubah menjadi peluang yang positif.

Perlunya analisis terhadap penerapan desentralisasi pendidikan ini telah dilakukan oleh banyak sekolah. Beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang implementasi desentralisasi pendidikan ini antara lain penelitian dari Hafifuddin (2017) dengan judul penelitian “Disentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe”. Penelitian ini membahas tentang dampak implementasi desentralisasi pendidikan bagi tenaga kependidikan atau tenaga pengajar, sedangkan penelitian ini akan lebih membahas tentang dampak implementasi desentralisasi pendidikan dalam segala aspek, baik bagi pengajar atau guru, siswa, maupun bagi pihak sekolah secara umum. Kedua, penelitian dari (Aini, 2022) dengan judul penelitian “Desentralisasi Pendidikan Madrasah melalui Otonomi Daerah di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan desentralisasi pendidikan pada jenjang pendidikan madrasah diseluruh Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada pelaksanaan desentralisasi pendidikan di salah satu Sekolah Menengah Atas yaitu di SMA Negeri 6 Batang Hari. Ketiga,

penelitian dari Ishak (2022) dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia”. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penerapan desentralisasi pendidikan di Indonesia yaitu pengendalian mutu pendidikan dan pembiayaan profesionalisme guru.

Hal di atas menjadi pemicu penulis untuk melakukan penelitian ini karena implementasi kebijakan pemerintah pusat untuk desentralisasi pendidikan ini perlu dianalisis pada setiap sekolah. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari, dampak positif serta dampak negatif implementasi desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari. Dengan demikian dapat ditentukan bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolah terhadap implementasi desentralisasi pendidikan di sekolah tersebut.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu situasi atau peristiwa yang dieksplorasi dan dijelaskan secara terperinci menggunakan deskripsi kata-kata. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 6 Batang Hari, yang terletak di Jl. Orang Kayo Hitam, Pasar Baru, kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Jambi. Responden penelitian ini berjumlah 5 orang yang meliputi kepala sekolah yaitu Bapak Alfakihi, S.Pd, wakil kepala sekolah yaitu Ibu Endang Kumala Ningsih, dua orang guru yaitu Ibu Septi Priyanti dan Bapak Muhammad Helmi, serta staf kependidikan yaitu Ibu Artika Sari. Instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara tentang implementasi desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6

Batang Hari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara terstruktur dan mendalam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*).

Hasil Dan Pembahasan

Hasil wawancara dengan 5 orang responden penelitian menghasilkan data utama yang harus dijabarkan mengenai desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari adalah bentuk program pendidikan, dampak positif dan dampak negatif desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari. Hasil penelitian diuraikan dalam bentuk poin berikut:

Bentuk Desentralisasi Pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari

Bentuk desentralisasi pendidikan disini antara lain implementasi Kurikulum terbaru saat ini yaitu Kurikulum 2013, pengeloaan kegiatan pendidikan oleh sekolah sendiri yang dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi dan menggerakkan kegiatan pendidikan dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi.

Program kegiatan pendidikan sebagai bentuk sistem desentralisasi disekolah ini yang paling inti dan utama adalah MBS. MBS ini turunannya adalah sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru dan menambah jam pembelajaran Teknologi Informasi Komputer dalam muatan lokal karena teknologi dibutuhkan oleh siswa saat ini. Bentuk kegiatan pendidikan sebagai bagian program desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari antara lain aplikasi kurikulum 2013 terbaru, MBS, sistem sekolah dengan zonasi dan menggerakkan sistem teknologi digitalisasi dalam kegiatan pendidikan.

Program pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari sebagai hasil dari

desentralisasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah pusat adalah MBS, lalu diikuti dengan penerimaan siswa baru sesuai dengan zona alamat rumah dan menggunakan media teknologi dalam pembelajaran. Selain itu meningkatkan kuantitas program ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini, seperti *English Club*. Pada umumnya bentuk kegiatan pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari sebagai pelaksanaan desentralisasi pendidikan nasional pada umumnya sama dengan sekolah-sekolah yang lain, seperti MBS, K-13, zonasi, teknologi informasi, ekstrakurikuler, ko-kurikuler, lomba antar sekolah dalam kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi.

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk implementasi desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari adalah sebagai berikut: 1) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Mulyadi dkk., (2021) menyatakan bahwa model manajemen ini memberi kewenangan pada setiap sekolah untuk mengatur program kegiatan pendidikan, membuat keputusan dan kebijakan, memberikan pelayanan bidang pendidikan dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Manajemen Berbasis Sekolah pada hakikatnya adalah penyerahan kebijakan, keputusan dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan kepada sekolah terkait. Athiyah (2019) menyebutkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 49, yang berfokus pada pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Achadah (2019) menambahkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah diidentikkan dengan implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan yaitu model pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada

setiap sekolah. b) Sistem Zonasi Sekolah. Sistem zonasi sekolah adalah salah satu kebijakan dari sistem desentralisasi pendidikan yang juga diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Rihardi & Yusliwidaka (2020) menjabarkan bahwa sistem zonasi sekolah ini meliputi penerimaan peserta didik baru yang sesuai dengan zona tempat tinggal sehingga sekolah memperoleh pemerataan jumlah siswa dan mendapatkan pemerataan siswa yang mempunyai nilai tinggi. c) Pengintegrasian Teknologi dalam Kegiatan Pendidikan.

Dampak Positif Desentralisasi Pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari

Setiap kebijakan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Desentralisasi pendidikan memberikan dampak positif di SMA Negeri 6 Batang Hari antara lain mutu pendidikan semakin meningkat, administrasi pendidikan berjalan lancar karena dikelola sesuai dengan fasilitas sekolah serta sesuai kemampuan Sumber Daya Manusia pada sekolah ini, lalu penyetaraan pendidikan terjamin karena sekolah tahu mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Dampak positif dari desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari adalah biaya pendidikan semakin hemat karena dengan adanya sistem zonasi, peserta didik tidak perlu bersekolah ditempat yang jauh, penyetaraan pendidikan terjamin, karena murid baru yang pintar-pintar tidak hanya didominasi oleh sekolah favorit namun juga dapat memasuki sekolah terdekat sesuai dengan sistem zonasi.

Desentralisasi pendidikan membawa dampak positif bagi SMA Negeri 6 Batang Hari, yaitu sekolah bisa mengatur sendiri fasilitas, sarana dan prasarana serta program kegiatan apa saja yang perlu dikembangkan disekolah. Selain itu sekolah dapat mengatur keuangan sendiri sehingga biaya pendidikan semakin murah, administrasi pendidikan dapat dikerjakan

dengan mudah. Selain itu, mutu pendidikan berangsur membaik karena sekolah fokus dalam memperbaiki “diri” setiap tahunnya. Kelebihan dari adanya desentralisasi pendidikan adalah banyak putra dan putri daerah dapat menjadi pegawai kontrak, honorer atau pekerja lepas pada sekolah terdekat. Kualitas pendidikan siswa terjamin karena disesuaikan dengan kemampuan siswa di daerah. Desentralisasi pendidikan membawa dampak positif bagi sekolah yaitu dengan mudahnya merencanakan dan mengevaluasi administrasi sekolah. Lalu, pendidikan merata bagi setiap anak, karena dengan berlakunya sistem zonasi, anak-anak ditempatkan di sekolah sesuai dengan alamat rumahnya.

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dampak positif desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari adalah sebagai berikut: a) Peningkatan Kualitas Pendidikan. Mutu pendidikan secara umum bisa dicapai mulai dari proses perencanaan kurikulum pendidikan. Yuhansil (2020) mengemukakan bahwa untuk mewujudkan mutu pendidikan, diperlukan perencanaan yang matang terkait landasan pendidikan, tujuan, kurikulum pendidikan. Kader & Kader (2019) menjelaskan bahwa penerapan desentralisasi pendidikan, kearifan lokal pada setiap daerah harus dipertimbangkan. Achmad & Hartono (2021) menyatakan bahwa desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan bagi setiap pejabat daerah, pengawas sekolah dan kepala sekolah untuk memastikan pengelolaan lembaga pendidikan sesuai dengan harapan bersama. Mangale dkk., (2020) menjabarkan bahwa implikasi dari desentralisasi pendidikan yaitu dapat meningkatkan profesionalisme guru. Widodo & Ervannudin (2016) menjelaskan bahwa desentralisasi pendidikan juga mencakup pengertian pendidikan berbasis masyarakat. b) Mengefisiensikan Administrasi Pendidikan. Kartika (2017)

menjelaskan bahwa pertumbuhan lembaga pendidikan tergantung bagaimana lembaga pendidikan mengatur kegiatan administrasi dengan baik. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan, maka administrasi pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien. c) Menyetarakan Pendidikan. Desentralisasi pendidikan memberikan ruang bagi setiap daerah untuk dapat menyetarakan pendidikan bagi setiap masyarakatnya. Ridwan (2021) menjelaskan bahwa berlakunya otonomi pendidikan memberikan peluang bagi setiap sekolah di daerah untuk menyetarakan pendidikan bagi masyarakatnya sehingga setiap daerah dapat berkompetisi dalam upaya membangun dan memajukan daerahnya masing-masing. Setyaningsih (2017) yang menyatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan solusi solutif untuk menyelaraskan pendidikan bagi setiap masyarakat. Armansyah (2016) menambahkan bahwa desentralisasi pendidikan membuat program pendidikan di setiap sekolah dilaksanakan secara terprogram, akuntabel dan transparan, namun menjadikan pendidikan efektif.

Dampak Negatif Desentralisasi Pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari

Desentralisasi pendidikan juga menimbulkan permasalahan di sekolah seperti dengan adanya kekuasaan atau wewenang daerah mengelola daerah sendiri termasuk bidang pendidikan, maka oknum-oknum tertentu mudah melakukan kolusi dan nepotisme contohnya dengan menempatkan kerabat terdekat atau sanak saudara bekerja sebagai pegawai kontrak atau honorer di instansi pemerintah. Hal ini juga pernah terjadi di SMA Negeri 6 Batang Hari.

Dampak negatif desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari adalah orang-orang yang menjawab pada posisi atau jabatan tertentu banyak yang

belum kompeten, karena SDM yang belum merata pada setiap daerah. Kendala yang masih menjadi perhatian akibat desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu manajemen pendidikan harus dilaksanakan secara seksama dan harus dilaporkan secara prosedural. Artinya, laporan kegiatan pendidikan tidak langsung diarahkan ke pusat tapi melalui pemerintah daerah. Hal ini menjadi kendala apabila laporan diperlukan dalam kondisi *urgent*, sehingga hal-hal yang bersifat prosedural akan memakan waktu yang lama.

Desentralisasi pendidikan akan menimbulkan celah untuk korupsi bagi pejabat dan aparatur negara. Hal ini karena pejabat daerah baik pejabat bidang pendidikan bebas mengelola keuangan sendiri dan melakukan kegiatan sesuai dengan kapasitas sekolah di daerah masing-masing. Masalah yang masih terlihat di SMA Negeri 6 Batang Hari akibat desentralisasi pendidikan adalah masih banyak tenaga pendidikan dan staf kependidikan yang belum maksimal baik dalam kompetensi, jabatan maupun penguasaan kemampuan dalam bidang masing-masing.

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dampak negatif desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari adalah sebagai berikut: a) Terciptanya kekuasaan baru yang belum tentu Kompeten. Akibat kebijakan desentralisasi pendidikan juga menimbulkan dampak negatif karena adanya persiapan yang belum matang pada sektor pendidikan di daerah. Maisyanah (2018) mendeskripsikan bahwa ada beberapa alasan masyarakat belum siap dengan sistem desentralisasi ini antara lain SDM masih belum memadai, sarana dan

prasarana belum lengkap, APBD yang masih rendah dan psikologi masyarakat yang masih takut dengan pembaharuan. Surya dkk., (2021) berpendapat bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan pada beberapa sekolah tidak berpengaruh pada pelayanan pendidikan di wilayah tersebut, contohnya di wilayah perbatasan. b) Membuka celah untuk Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu dampak negatif implementasi desentralisasi pendidikan yang selama ini sudah berjalan adalah adanya celah untuk melakukan tindakan KKN. Fatkhuri (2019) menyampaikan bahwa desentralisasi membuat ruang bagi para elit pemangku jabatan untuk melakukan korupsi karena dana pendidikan langsung diurus oleh pejabat terkait, hal ini seperti adanya pembelokan dana APBN. c) Tantangan Lainnya. Dengan adanya kebijakan desentralisasi pendidikan ini, maka kegiatan manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan pendapatan asli pada setiap daerah, hal ini akan berdampak pada daerah terpencil yang pendapatan daerahnya kecil. Zaidun Naim (2014) menjelaskan bahwa kelemahan sistem desentralisasi pendidikan antara lain tidak meratanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya daerah-daerah terisolir dan terpencil. Nabila dkk., (2018) menyatakan bahwa terkait implementasi desentralisasi pendidikan maka informasi bersifat prosedural dan adakalanya sampai pada tingkat daerah lama, selain itu terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi informasi dari setiap sekolah di daerah terhadap informasi dari pusat.

Secara rinci, analisis SWOT dari implementasi desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel. 1 Analisis SWOT Desentralisasi Pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari

<i>Strengths</i>	<i>Weaknesses</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan kebijakan nasional 2. Meningkatkan mutu pendidikan 3. Efisiensi administrasi pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kekuasaan baru yang belum kompeten 2. Adanya celah KKN

4. Menyetarakan pendidikan	3. Belum sesuai untuk daerah terpencil 4. Informasi dari pusat multitafsir
<i>Opportunities</i>	<i>Threats</i>
1. Setiap sekolah dapat membuat kebijakan program pendidikan sendiri 2. Kurikulum pendidikan sekolah dapat mengembangkan budaya dan kearifan lokal daerah 3. SDM dapat menimba pengalaman lebih banyak	1. Keputusan dan kebijakan yang diambil setiap sekolah berbeda-beda 2. Persepsi pelaku kependidikan disekolah tidak dapat mewujudkan harapan pemerintah pusat 3. Banyaknya tantangan yang dihadapi sekolah yang ada di perbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa poin. Pertama, bentuk desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sistem zonasi sekolah, dan pengintegrasian teknologi dalam kegiatan pendidikan. Kedua, dampak positif desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu peningkatan kualitas pendidikan, efisiensi administrasi pendidikan dan penyetaraan pendidikan. Ketiga, dampak negatif desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu adanya kekuasaan baru yang belum kompeten, adanya celah untuk praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta menimbulkan tantangan lainnya.

Daftar Pustaka

- Achadah, A. (2019). Manajemen berbasis sekolah (MBS): Konsep Dasar dan Implementasinya pada Satuan Pendidikan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 4(2), 77–88.
- Achmad, H., & Hartono, S. (2021). Manajemen Pendidikan: Desentralisasi dan Kepemimpinan Kependidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(4), 307.
- Aini, M. (2022). Desentralisasi Pendidikan Madrasah melalui Otonomi Daerah di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12, 95–106.
- Armansyah, Y. (2016). Menyoal Relevansi Kebijakan Otonomi Daerah Dan Otonomi Pendidikan Dikaji Dari Kesejahteraan. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 141–160.
- Athiyah, C. U. (2019). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Sebagai Alternatif Desentralisasi Pendidikan di MAN 4 Jakarta. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 7(1), 130–145.
- Fatkhuri. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia : Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 278–297.
- Hafifuddin. (2017). Disentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe. *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 8(2), 169–186.
- Ishak, D. (2022). Tinjauan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 5(1), 30–36.
- Kader, K., & Kader, A. (2019). Partisipasi

- Masyarakat dan Pengintegrasian Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Pendidikan sebagai Bentuk Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan. *Journal of Ethnic Diversity & Local Wisdom*, 1(1), 32–40.
- Kartika, Q. (2017). Dinamika Lembaga Pendidikan Mempertahankan Eksistensi Pada Era Kompetitif. *Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 112–131.
- Maisyannah, M. (2018). Analisis Dampak Desentralisasi Pendidikan Dan Relevansi School Based Management. *Quality*, 6(2), 1-10.
- Mangale, R. S., Kadir, S., & Rahmawati. (2020). Efektivitas desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di sma negeri 1 lakea. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 853–861.
- Mok, K. H., & Han, X. (2017). Higher education governance and policy in China: Managing decentralization and transnationalism. *Policy and Society*, 36(1), 34–48.
- Mulyadi, Y., Hermawan, I. C., & Sulaeman, T. (2021). Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 125–138.
- Nabila, I., Herawati, R., & Saraswati, R. (2018). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 terhadap Desentralisasi Pendidikan di Kabupaten Tegal. *Diponegoro Law Journal*, 7(3), 293–306.
- Ridwan, I. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikam Karakter “JAWARA,”* 7, 87–110.
- Rihardi, S. A., & Yusliwidaka, A. (2020). Menakar Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Di Era Desentralisasi Pendidikan. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 11(1), 1–13.
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215.
- Sabil, N. F., & Diantoro, F. (2021). Sistem Pendidikan Nasional Di Pondok Pesantren. *Al-Ishlah*, 19(2), 209–230.
- Saleh, K. A. (2017). Mengelola Hubungan Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi. *Ilmu dan Budaya*, 40(55), 6289–6304.
- Saleh, S. (2017). Peran lembaga pendidikan dalam membentuk karakter bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, 2, 101–112.
- Sanur, D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 11(1), 65–83.
- Setyaningsih, K. (2017). Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat. *Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 80.
- Sulaeman, M. (2022). Urgensi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

- Di Lembaga Pendidikan Islam. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 16(1), 1–19.
- Sulaiman, M., Al Hamdani, M. D., & Aziz, A. (2018). Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2013. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 6(1), 77
- Surya, I., Budiman, Syarifuddin, T. I., & Nurmiyati, N. (2021). Dampak Desentralisasi Terhadap Pelayanan Pendidikan di Daerah Perbatasan Kalimantan. *Jurnal Agregasi*, 9(1), 1–23.
- Widodo, B. W., & Ervannudin, N. (2016). Desentralisasi Pendidikan Dan Peran Aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas. *Jurnal Penelitian*, 10(1), 147–172.
- Yalida, A. (2019). Pendidikan Karakter Yang Berbasis Pada Nilai-Nilai Pancasila di Kelas Iv SDN 88 Kota Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 2(1), 23–32.
- You, Y., & Morris, P. (2016). Imagining school autonomy in high-performing education systems: East Asia as a source of policy referencing in England. *Compare*, 46(6), 882–905.
- Yuhansil, Y. (2020). Manajemen Kurikulum dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 3(2), 214–221.
- Zaidun Naim. (2014). Implikasi Desentralisasi Pendidikan Pada Pengembangan Pendidikan Islam. *Ta'limuna*, 3(2), 145.
- Zaman, B. (2019). Urgensi pendidikan karakter yang sesuai dengan falsafah bangsa ndonesia. *AL GHAZALI, Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Studi Islam*, 2(1), 16–31.
- Zilfa, R. (2016). *Desentralisasi Pendidikan. JOIES: Journal of Islamic Education Studies* (Vol. 1).